

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KEPEMIMPINAN *INCUMBENT* DALAM PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh:**

**AAN SUGARA  
BP: 06 193 090**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

## ABSTRAK

**AAN SUGARA, 06193090, skripsi dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan *Incumbent* Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 . Sebagai Pembimbing I Drs. Agus Budiono, M.S dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP. M.PP Skripsi ini terdiri dari 62 halaman dengan 14 referensi buku, 3 skripsi, 4 undang-undang dan 2 situs internet.**

Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2008 merupakan Pemilukada Pertama kali pada masa otonomi daerah di terapkan. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat Kabupaten Merangin terhadap kepemimpinan *incumbent*. Penelitian ini menggunakan pendekatan pilihan rasional dalam teori perilaku memilih (*voting behavior*) dengan menggunakan variabel penilaian masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan desain *Cross-Sectional*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara langsung terhadap responden (*face to face interview*). Responden dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling*. Unit analisis data adalah individu dengan tingkat analisis mikro. Selanjutnya dalam analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tabel frekuensi.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap pembangunan pada masa kepemimpinan *incumbent*. Dalam bidang pendidikan, masyarakat memberikan penilaian yang kurang memuaskan. Kemudian masyarakat memberikan penilaian yang tidak baik terhadap keadaan ekonomi Kabupaten Merangin secara umum pada masa kepemimpinan *incumbent*. Begitu juga dalam bidang kesehatan, persepsi masyarakat kurang memuaskan terhadap kepemimpinan *incumbent* dalam bidang kesehatan. Sedangkan dalam bidang pelayanan publik, mayoritas masyarakat memberikan persepsi atau penilaian yang baik terhadap pelayanan publik pada masa kepemimpinan *incumbent*.

**Kata kunci: Masyarakat Kabupaten Merangin, Penilaian Masyarakat dan Pemilukada**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum merupakan momen penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan, baik di lembaga Legislatif maupun di lembaga Eksekutif.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yakni dari pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan tahun 2004. Pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan tersendiri di banding dengan pemilihan umum di tahun yang lain<sup>1</sup>, karena keduanya diselenggarakan dalam dua tahap. Pemilihan umum 1955 tahap pertama sebagai tahap pemilihan anggota legislatif serta yang ke dua sebagai tahap pemilihan anggota konstituante. Sedangkan pemilihan umum 2004, tahap pertama sebagai tahap pemilihan anggota Legislatif serta anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kedua sebagai tahap pemilihan Eksekutif atau presiden. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan untuk memilih eksekutif atau presiden secara langsung oleh rakyat.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008: hlm 473

Perubahan-perubahan situasi politik dalam pemilihan umum 2004 membawa pengaruh pada pemerintahan di daerah. Tuntutan proses demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah yang memberikan pola baru dalam rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung cikal-bakalnya melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, namun dalam Undang-Undang ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih ditentukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bukan dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kedua Undang-Undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipil karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Perbedaan dan perubahan yang menonjol pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilakukan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sesuai tuntutan reformasi yaitu mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No.32 tahun 2004 menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56

ayat 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Kemudian pasal 56 ayat 2 menyatakan, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan pada pasal 59 ayat 2 menyatakan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat perolehan suara sekurang-kurangnya 15% kursi dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Aturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung di sempurnakan lagi melalui Undang-Undang No.12 tahun 2008. Undang-Undang tersebut membuka peluang bagi calon perseorangan untuk ikut sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu disebutkan pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No.12 tahun 2008, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. Pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang ini masih sama dengan yang diatur pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai sekurang-kurangnya 15%

kursi dari jumlah kursi di DPRD atau mempunyai sekurang-kurangnya 15% akumulasi suara dari jumlah suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan.

Sedangkan pada pasal 59 ayat 2(b) Undang-Undang No.12 tahun 2008 mengatakan, calon perseorangan untuk ikut sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat:

- a. Daerah Kab/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.
- b. Daerah Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5%.
- c. Daerah Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4%
- d. Daerah Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%

Bentuk dukungan bagi calon perseorangan tersebut di atur pada pasal 59 ayat 2(e) Undang-Undang No.12 tahun 2008 yaitu dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk(KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah, hal itu di sebabkan karena ia

dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya memperkuat legitimasi kepala daerah, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat daerah dalam memilih dan menentukan pemimpin mereka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga dapat dijadikan latihan kepemimpinan bagi elit-elit lokal di daerah dalam mengembangkan kecakapannya, serta membangun komunikasi politik dengan masyarakat dan melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah terpilih nantinya dapat merumuskan sebuah kebijakan yang bertujuan mengatasi persoalan-persoalan yang ada didalam kehidupan masyarakat.

Kepala daerah yang dapat dipilih secara langsung adalah Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat berhak menentukan pemimpinnya yang dianggap memenuhi syarat-syarat seorang pemimpin yang baik.

Seorang kepala daerah diharapkan dapat menjadi panutan, memahami persoalan masyarakatnya, bertanggung jawab atas amanat yang diemban. Kepala daerah juga diharapkan memiliki wawasan pengetahuan yang luas agar dapat menyelesaikan persoalan daerahnya dengan baik. Sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menjadi titik tolak keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kualitas calon kepala daerah yang terpilih sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat pada saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi, yang sebelumnya bergabung dengan Sarolangun dengan nama Sarolangun Bangko( SARKO) dengan ibu kotanya yaitu Bangko. Nama Sarolangun Bangko merupakan gabungan antara Sarolangun dan Bangko. Pada tahun 1999 kedua kabupaten ini memisahkan diri berdasarkan undang-undang nomor 54 tahun 1999, Sarolangun menamakan kabupatennya Sarolangun, sedangkan Bangko menamakan kabupatennya sebagai Kabupaten Merangin<sup>2</sup>.

Kabupaten Merangin di pimpin oleh Bupati Rotani Yutaka yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin. Kepemimpinan Rotani Yutaka berlangsung dalam 2 periode (1998-2003 dan 2003-2008) yang berakhir pada tahun 2008. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Rotani Yutaka pada tahun 2008 tersebut, maka diperlukan pemilihan kepala daerah baru untuk mengisi dan menentukan pemimpin Kabupaten Merangin kedepannya.

Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2008 merupakan Pemilukada yang pertama diadakan dalam masa otonomi daerah dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 200.344 pemilih, Pemilukada tersebut di selenggarakan pada tanggal 22 juni tahun 2008. Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2008 diikuti oleh empat pasangan kandidat calon Bupati, yang bisa dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>2</sup> <http://scriptintermedia.com/view.php?id=6453> (diakses pada tanggal 18-05-2011 jam 23.00 WIB)



**Tabel 1.1**  
**Data Pasangan Calon Dan Partai Pengusung Serta Perolehan Suara Dari**  
**Jumlah Suara Sah Masing-Masing Calon Bupati<sup>3</sup>**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Jumlah Kursi di DPRD	% Suara Partai Pada Pemilu 2004 Berdasarkan Jumlah Kursi	Perolehan Suara Calon Pada Pilkada
1.	Drs.H. Nalim SH,MM dan Drs.H Hasan Basri Harun	a. PAN/4 kursi b. PKS/1 kursi c. PNI Marheanisme/1 kursi d. PKPB/2 kursi e. Partai Merdeka/1 kursi	9 kursi (30%)	69.889 (45% suara)
2.	H. Handayani SKM Dan Saptono S.pd	a. Golkar/7 kursi b. PBB/2 kursi c. PBR/1 kursi d. PIB/1 kursi e. Partai pelopor/non kursi	11 kursi (36,67%)	30.301 (19% suara)
3.	Drs. H. M Madel Dan Zainul arfan S.TP	a. PDIP/ 3 kursi b. PDK/1 kursi	4 kursi (13,33%)	13.392 (9% suara)
4.	H. Arfandi Ibnu Hajar SE Dan H. Iskandar . B	a. PPP/3 kursi b. PKB/1 kursi c. Patai Demokrat/1 kursi	5 kursi (16,67%)	42.246 (27% suara)

*Sumber: KPU Kabupaten Merangin tahun 2010*

Dari tabel diatas terlihat bahwa pasangan Handayani-Saptono memiliki dukungan terbesar dari partai yang mempunyai kursi pada pemilu tahun 2004 di DPRD Kab. Merangin sebanyak 36,67% kursi, kemudian diikuti oleh pasangan Nalim-Hasan Basri Harun 30% kursi, Pasangan Arfandi Ibnu Hajar-Iskandar 16,67% dan pasangan Madel-Zainul Arfan sebanyak 13,33% kursi.

Ternyata dukungan dari partai yang mempunyai jumlah kursi terbesar di DPRD tidak menjamin bagi kemenangan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat pemilihan berlangsung. Dimana sebelumnya, pasangan Nalim-Hasan Basri Harun berada pada urutan kedua yaitu sebanyak 30%

<sup>3</sup> KPU Kabupaten Merangin 2010

dukungan dari partai yang memiliki kursi di DPRD Kab. Merangin, ternyata sebagai pemenang dengan memperoleh 45% suara dari jumlah suara sah. Pasangan ini memperoleh kenaikan jumlah dukungan sebesar 15%, yakni dari 30% suara menjadi 45% suara. Kemudian diikuti oleh pasangan Arfandi Ibnu Hajar-Iskandar dengan memperoleh 27% suara dari jumlah suara sah yang sebelumnya pasangan ini berada pada urutan ketiga dengan 16,67% dukungan dari jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Merangin. Pasangan ini juga memperoleh kenaikan dukungan sebesar 10,33% yakni dari 16,67% menjadi 27% suara.

Pasangan Handayani-Saptono yang sebelumnya memiliki dukungan terbesar dari jumlah kursi di DPRD Kab. Merangin sebanyak 36,67%, hanya menempati urutan ketiga pemenang pilkada Kab. Merangin dengan memperoleh 19% suara dari jumlah suara sah. Artinya pasangan ini mengalami penurunan dukungan sebesar 17,67%. Kemudian pasangan Madel-Zainul Arfan memperoleh 9% suara dari jumlah suara sah, pasangan ini tidak mengalami perubahan posisi dukungan, dimana sebelumnya pasangan ini juga menempati urutan keempat dari dukungan partai yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Merangin yaitu sebesar 13,33% kursi. Tetapi pasangan ini juga mengalami penurunan jumlah dukungan sebesar 4,33% yakni dari 13,33% menjadi 9% suara.

Calon bupati Nalim berasal dari Kec. Tabir ulu dan pasangannya Hasan Basri Harun berasal dari Kec. Jangkat dengan jabatan terakhirnya sebagai Sekretaris daerah (Sekda) Kab. Sarolangun yang pensiun pada tahun 2006. Pasangan ini mempunyai Visi yakni memimpin Kab. Merangin menuju

masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, adil dan sejahtera. Sedangkan misi dan program utamanya yaitu meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan<sup>4</sup>.

Pasangan Nalim-Hasan Basri Harun merupakan kandidat pendatang baru, karena sebelumnya pasangan tersebut bertugas di luar Kabupaten Merangin. Walaupun pasangan ini sebagai pendatang baru, tetapi setahun sebelumnya pasangan ini sudah sering mengunjungi masyarakat. Dengan kata lain pasangan ini sudah sering mengadakan acara tatap muka dengan berbagai kelompok masyarakat, baik kelompok keagamaan (majlis Ta'lim), kelompok olah raga, kelompok hobi maupun lainnya. Sehingga secara tidak langsung pasangan ini di kenal oleh berbagai kalangan masyarakat.

Calon Bupati Handayani berasal dari Kecamatan Bangko yang merupakan pemilik Yayasan Akademi Kebidanan Merangin dan jabatan terakhirnya sebagai staf pada dinas kesehatan Kabupaten Merangin. Sedangkan pasangannya Saptono berasal dari Kecamatan Pamenang dengan jabatan terakhirnya sebagai pengawas sekolah dasar di Kecamatan Pamenang. Visi pasangan ini yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Merangin, menuju Merangin yang mandiri, maju, demokratis dan berkeadilan melalui tata pemerintahan yang baik dan bersih. Misi utamanya yakni mengembangkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Merangin dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang ramah dan mudah dengan program utamanya yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> KPU Kabupaten Merangin 2010.

<sup>5</sup> KPU Kabupaten Merangin 2010

Calon Bupati Handayani memang berasal dari Kecamatan Bangko sebagai Kecamatan terbesar penduduknya di Kabupaten Merangin, namun prestasinya dalam birokrasi atau pemerintahan belum ada, karena ia hanya merupakan salah satu staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Begitu juga dengan pasangannya Saptono yang hanya sebagai pengawas sekolah dasar di Kecamatan Pamenang, sehingga kedua pasangan kurang di kenal oleh masyarakat.

Kemudian calon bupati Madel merupakan mantan bupati Kabupaten Sarolangun. Walaupun merupakan mantan Bupati Kabupaten Sarolangun, namun ia mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat Merangin, karena pada periode sebelumnya Kabupaten Sarolangun masih bergabung dengan Kabupaten Merangin dengan nama SARKO (Sarolangun Bangko). Hal ini membuatnya dikenal oleh masyarakat.

Sedangkan pasangannya Zainul Arfan berasal dari Kecamatan Sungai Manau yang merupakan ketua partai PDI Perjuangan Kabupaten Merangin. Visi pasangan ini yaitu menjadikan Merangin yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan sejahtera dengan Motto” mewujudkan Merangin hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Misi dan program utamanya adalah mewujudkan pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan umum serta lembaga pemerintahan yang berkualitas<sup>6</sup>.

Kemudian calon bupati Arfandi Ibnu Hajar berasal dari Kab.Muaro Jambi. Walaupun ia bukan berasal dari Kab. Merangin tetapi ia sudah lama tinggal di Kab.Merangin. Prestasinya pun cukup baik, dimana saat itu ia menduduki jabatan

---

<sup>6</sup> KPU Kabupaten Merangin 2010

sebagai Sekretariat daerah (Sekda) Kab. Merangin. Hal ini secara tidak langsung membuatnya dikenal baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat lainnya. Sedangkan pasangannya Iskandar berasal dari Kec. Bangko, namun ia merupakan wirausaha di Australia. Visi pasangan ini yaitu menjadikan Merangin yang tertib, maju, aman, dan damai (Merangin teman anda). Misi dan program utamanya yakni mendayagunakan kemampuan aparatur pemerintahan secara profesional, proporsional dan akuntabel dalam menciptakan pemerintahan yang baik dengan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintahan<sup>7</sup>.

Dari penjelasan di atas, mengapa dukungan Pemilih banyak diberikan kepada pasangan Nalim-Hasan Basri Harun pada pemilihan Kepala Kabupaten Merangin tahun 2008? Jika dilihat dari biografi hidupnya, Nalim bukanlah sosok yang begitu dikenal di Kabupaten Merangin, ia merupakan seorang anggota polisi dengan pangkat komisarisi polisi, jabatan terakhirnya sebagai Kabag Dalpres Biro Personil di Kapolda Sumatera Barat<sup>8</sup>. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa calon Bupati Arfandi Ibnu Hajar yang merupakan calon *incumbent* kalah dalam pemilihan Kepala Kabupaten Merangin tahun 2008? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya selama ini?

Pertanyaan ini muncul seiring dengan konsep *rational choice* yang mengatakan bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan penilaian rasional dari warga yang cakap. Menurut Key, masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif yaitu dengan menilai kinerja

---

<sup>7</sup> KPU Kabupaten Merangin 2010

<sup>8</sup> <http://meranginjambi.blogspot.com/2008/06/rekam-jejak-h-nalim-bupatimerangin.html> ( diakses pada tanggal 18-05-2011 jam 23.30 WIB )

pemerintah yang sedang berkuasa, apabila hasil penilaian kinerja pemerintah yang berkuasa positif (jika di bandingkan dengan pemerintah sebelumnya) maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif maka pemerintah tersebut tidak akan dipilih kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “ bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan *incumbent* dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Merangin tahun 2008”. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini merupakan penilaian masyarakat terhadap pemerintah sebelumnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan bab terdahulu, baik dalam rangka teoritis, pendeskripsian, Tabel distribusi frekuensi maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan *incumbent* dalam pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2008 dalam bidang pembangunan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pelayanan publik, Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap pembangunan pada masa kepemimpinan *incumbent*.

Dalam bidang pendidikan, penilaian masyarakat terhadap pendidikan secara umum kurang memuaskan pada masa kepemimpinan *incumbent*, dimana nilai persentase kurang baik dan tidak baik lebih besar dari nilai persentase baik yang diberikan oleh responden. Kemudian 55,6% responden memberikan penilaian yang baik terhadap kondisi sarana pendidikan di tempat tinggalnya masing-masing.

Kemudian dalam bidang ekonomi, mayoritas responden memberikan penilaian yang tidak baik terhadap keadaan ekonomi Kab. Merangin secara umum pada masa kepemimpinan *incumbent*. Namun mayoritas responden menyatakan keadaan ekonominya dalam keadaan yang baik pada masa kepemimpinan

*incumbent*.

Dalam Bidang Kesehatan, Persepsi atau penilaian masyarakat dalam bidang kesehatan tidak baik atau dengan kata lain kurang memuaskan terhadap kepemimpinan *incumbent*. Dalam bidang pelayanan publik, mayoritas masyarakat memberikan persepsi atau penilaian yang baik terhadap pelayanan publik pada masa kepemimpinan *incumbent*.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran berikut:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan *incumbent* dalam pemilu pada Kabupaten Merangin tahun 2008 dengan variabel yang sama.
2. Diharapkan masyarakat dapat mengumpulkan informasi yang lebih baik mengenai prestasi pemerintahan sebelumnya, sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif kedepannya
3. Diharapkan agar masyarakat Kabupaten Merangin terus meningkatkan rasionalitasnya dalam memilih, sehingga dapat menghasilkan calon yang berkualitas untuk memimpin Kabupaten Merangin kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Rozali. 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Huntington, P Samuel dan Nelson J. 1994. *Partisipasi politik di Negara berkembang*, Jakarta: Rineka cipta
- Koentjaraningrat. 1996, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Melly, G, Tan. 1994. *Penggunaan data kuantitatif, metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Plano, Jack. 1985. *Kamus analisa politik*. Jakarta: rajawali Press
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina, Miftahul. 2005, *Metode penelitian kuantitatif, teori dan aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Riduwan. 2005. *Dasar-dasar statistika*, Bandung: Alfabeta
- Roth, Dieter. 2008, *Studi Perilaku Empiris, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, Jakarta: Friedrich-Numan-Stiftung Fur Die Freiheit
- Singarimbun, M dan Effendi S ( edt ), 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES
- Siregar, Syofian, 2010, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soehartono, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Risdakarya
- Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

**Undang-Undang:**

Undang-Undang No.55 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1999

Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang otonomi daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004

Undang-Undang No.22 tahun 2007 Tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 tahun 2007

Undang-Undang No.12 tahun 2008 Tentang aturan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008

**Website:**

<http://Scriptintermedia.com/view.php?id=6453> (di akses pada tanggal 18-05-2011 jam 23.00 WIB)

<http://meranginjambi.blogspot.com/2008/06/rekam-jejak-h-nalim-bupati-merangin.html> (diakses pada tanggal 18-05-2011 jam 23.30 WIB)

**Skripsi:**

Permana, Fredo. 2007, Perilaku memilih Mahasiswa Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta Dalam Pilkada Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2005, Skripsi, Tidak dipublikasikan, FISIP Unand Padang

Wirدانingsih, Ratih. 2007, Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2005, Skripsi, Tidak dipublikasikan, FISIP Unand Padang

Yuliasuti, Tri. 2007, Voting Behavior Masyarakat Terasing ( Kasus Suku Anak Dalam? SAD) Dalam Pilkada Bupati Sarolangun tahun 2006, Skripsi, Tidak dipublikasikan, FISIP Unand Padang